BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penggalian dan analisa data dalam penelitian ini, peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu,

1. *Partisipasi Politik KIPP Gresik Dalam Pemantauan Pilkada Gresik 2015*

   a. Praktik Pemantauan KIPP Gresik

   Pemantauan yang dilakuan oleh KIPP Gresik telah menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Plkada Gresik 2015. Pemantauan pemilu sendiri termasuk ke dalam sebuah kegiatan partisipasi politik dikarenakan adanya beberapa kriteria konsep partisipasi politik yang melekat pada kegiatan pemantauan pemilu. Melalui berbagai kegiatannya yang berkaitan dengan masyarakat, KIPP juga dapat dikategorikan sebagai aktor yang berupaya mendorong masyarakat kepada klasifikasi pemain *(gladiator)* dalam tingkatan partisipasi politiknya. Mereka yang tergolong ke dalam klasifikasi pemain *(gladiator*) akan selalu aktif dalam mengikuti proses politik.

   b. Independensi para kader dan KIPP Gresik

   Para kader KIPP Gresik dituntut agar tetap independen dalam mengikuti kegiatan-kegiatan KIPP. Pada peneliti, mereka mengaku tidak pernah melakukan *deal-deal* politik dalam melakukan pemantauan Pilkada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Gresik tahun 2015. Hal tersebut juga ditekankan kepada relawan-relawan pemantau pemilu pada Pilkada kemarin. Umumnya mereka mengenal para kontestan namun tidak memiliki kedekatan yang khusus.

c. Independensi Pemantauan Pemilu Dalam Konsep Civil Society

Dalam kacamata konsep *civil society*, KIPP adalah bagian dari pengelompokan-pengelompokan sosial yang ada di dalam *civil society*. Dengan independensinya, KIPP dapat memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas substansi kehidupan yang demokratis di Indonesia.

Hasil penggalian data yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa sumber keuangan dari organisasi KIPP Gresik berasal dari swadaya para pengurus. Sepertihalnya pembiayaan dalam pemantauan Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2015 yang lalu, secara swadaya pembiayaan kegiatannya dihimpun dari para pengurus dan anggota. Hal tersebut juga memiliki dampak pada minimnya anggaran yang terdapat dalam organisasi KIPP Gresik. Kemandirian anggaran menjadi salah satu modal utama KIPP Gresik untuk tetap menjadi organisasi yang indpenden dalam menjalankan setiap kegiatan-kegiatannya.

2. *Problem Pemantauan KIPP Gresik Dalam Pemantauan Pilkada Gresik 2015*

Data yang telah dihimpun serta analisa peneliti menunjukkan bahwa KIPP Gresik dalam melakukan pemantauan di Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2015 merasa terhambat oleh beberapa faktor yaitu,

a. Aturan yang membatasi ruang gerak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak dan petunjuk teknis pemantauan yang telah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum dianggap sebagai salah satu penghambat oleh KIPP Gresik ketika melakukan kegiatan pemantauan dalam pemilu. Hal inilah dianggap menjadikan KIPP dan para pemantau secara umum tidak memiliki perbedaan dengan masyarakat biasa yang sedang menonton proses pemungutan dan pengitungan suara dalam pemilu.

b. Tidak berjalannya program-program di internal KIPP Gresik

Pemantauan Pilkada Gresik tahun 2015 yang dianggap oleh para pengurus KIPP Gresik belum bisa berjalan dengan maksimal salah satu kemungkinan besarnya disebabkan oleh internal organisasi KIPP Gresik yang belum bisa secara konsisten menjalankan program-program di luar pemantauan pemilu. Partisipasi para kader untuk selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan diskusi yag diselenggarakan oleh KIPP Gresik masih tergolong rendah. Hal ini tentu berdampak pada kurang optimalnya kinerja KIPP Gresik ketika melakukan kegiatan pemantauan pada event-event pemilihan umum.

B. Saran

Peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut,

1. KIPP
2. Meskipun KIPP Gresik tetap bertahan dan eksis melakukan pemantauan di setiap momen pemilu umum, namun peneliti beranggapan bahwa KIPP Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu secepatnya melakukan reformasi manajemen agar proses kaderisasi dan perekrutan anggota dapat berjalan dengan baik.

3. Program-program yang diagendakan KIPP Gresik di luar pemantauan pemilu perlu dijalankan dengan konsisten untuk meningkatan kapasitas dan integritas para kader.
4. Laporan akademik yang dibuat oleh KIPP Gresik dalam pemantauan-pemantauan pemilu yang akan datang seharusnya bisa dibuat dengan lebih konperhensif.
5. Harus dibentuk sebuah divisi dalam struktur kepengurusan organisasi KIPP Gresik yang membidangi perekonomian organisasi. Ketidaktuntasan finansial bisa menjadi ancaman bagi KIPP Gresik di masa yang akan datang.
6. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait perkembangan dinamika dalam pemantauan pemilu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id